

Analisis Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Lulus BTA dan PPI di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto)

¹Teguh Wiyono*

¹Univeritas Amikom Purwokerto

Abstract

This research is a qualitative field study targeting all parties involved in the policy-making process, using a phenomenological approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documents. Data analysis was performed by interpreting the collected data, and from these interpretations, conclusions were drawn and described descriptively. The research results show that first, Muhammadiyah Junior High School 3 Purwokerto aims to enhance the reading, writing, and practice of Qur'anic verses (BTA) and the practice of worship (PPI) among its students in its policy-making. Second, the policy implementation is proceeding well because the teachers and the school provide mutual feedback. Third, several supporting factors for the policy include the teachers being hafiz and hafizah, and the policy being fully supported by the parents. However, there are some inhibiting factors: first, many graduates from public schools lack familiarity with BTA and PPI; second, the allocated time is too short, as only 60 minutes are provided; third, the budget is insufficient to fund the policy program to improve its quality.

Keywords: Analysis, Public Policy, Graduation Policy.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field riset) yang bersifat kualitatif. Sasarannya adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi wawancara dan dokumen. Analisis data, yang dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan dari makna tersebut ditarik kesimpulan dengan memaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 3 Purwokerto dalam menetapkan kebijakan lulus bertujuan meningkatkan Baca, Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) bagi para siswanya. Kedua, Implementasi kebijakan berjalan dengan baik karena dari pihak pengajar dan sekolah saling memberikan masukan. Ketiga, beberapa faktor pendukung dalam kebijakan diantaranya, para pengajar adalah seorang hafid dan hafidzah, kebijakan tersebut didukung penuh oleh wali murid. Kemudian faktor penghambat, diantaranya Pertama, banyaknya lulusan dari sekolah umum yang kurang mengenal BTA dan PPT. Kedua, waktunya terlalu singkat karena hanya diberi waktu 60 menit. Ketiga, Anggaran yang tidak mencukupi untuk mendanai program kebijakan agar lebih berkualitas.

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan Publik, kebijakan Lulus.

***Author Correspondence:** Teguh Wiyono, email: teguh.w@amikompurwokerto.ac.id, Alamat Prum. Bukit Sidabowa Asri Blok E-9, Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos. 53171

Pendahuluan

Kecenderungan globalisasi di era sekarang ternyata selalu menawarkan hal yang serba baru, mulai dari masalah materi dan gaya hidup sampai dengan konsep berfikir, dalam perkembangannya selalu lebih cepat dari pada perkembangan inovasi pendidikan. Untuk itu, perlu inovasi kreatif dalam pendidikan, agar dunia pendidikan mampu mengimbangi pesatnya perubahan yang terjadi di industri. Dampak globalisasi tersebut juga merambah kedalam bidang pendidikan termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dalam UU Sistem pendidikan nasional Nomor 20 tahun 2003, Sekolah Menengah Pertama merupakan organisasi pendidikan formal, yang tujuan utamanya adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan di era globalisasi dituntut untuk mampu menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat. Hal ini berarti, pendidikan di era global dituntut untuk bermutu. Namun kenyataan di lapangan terjadi berbagai problem berkaitan dengan para lulusan yang tidak sesuai dengan mutu pendidikan khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu Problem moral yang terjadi pada siswa diantaranya ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, penyelenggaraan kegiatan seksual secara bebas, dan etos kerja / semangat belajar

yang rendah. (Koran Kolom Opini SatelitPost Purwokerto, edisi 14 Januari 2018). Hal tersebut yang disebabkan karena rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama (Koran Kolom Opini SatelitPost Purwokerto, edisi 9 Agustus 2018).

Kemudian banyaknya para lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak mengetahui Baca Tulis Al Qur'an (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) dengan baik padahal hal tersebut sangat penting. (Hasil Wawancara dengan Endah Susanti, M.Pd selaku kepala Sekolah).

Sedangkan menurut Sa'id Aqiel Siradj, dkk, menyatakan bahwa solusi dari permasalahannya adalah dengan pendidikan yang terpadu yaitu pendidikan formal secara umum dipadukan dengan pendidikan yang ada di Pesantren. Dengan pemaduan tersebut dapat menghasilkan para lulusan yang bisa menguasai ilmu pengetahuan sains dan memiliki sikap yang religius sesuai dengan ajaran Islam. (Sa'id Aqiel Siradj, 1999).

Berkaitan dengan pendidikan terpadu yang ditawarkan oleh Sa'id Aqiel Siradj, dkk, sebenarnya sejalan dengan visi dan misi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Purwokerto yang membuat Kebijakan bagi para siswanya untuk lulus Baca Tulis Al Qur'an (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) diajar oleh para ustadz dari pondok Pesantren. Hal ini, bertujuan untuk menciptakan lulusan yang berilmu, berkualitas/berkarakter dan mengetahui ajaran-ajaran Islam yang benar.

Kebijakan (*Policy*) secara "etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya kota (*city*), kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga

dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Syafaruddin, 2008). Salah satu tujuannya yaitu memudahkan dan memberikan ruang gerak bagi insan pendidikan Indonesia untuk terus berinovasi dan membangun pendidikan yang berkarakter sesuai dengan harapan pendidikan nasional.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat menyebutkan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa,” dalam hal ini bangsa mencakup seluruh warga negara Indonesia baik warga yang belajar di sekolah-sekolah negeri, maupun yang belajar di sekolah swasta dalam hal ini kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik (Ratna Dewi, 2016).

Harold D Laswell mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Sedangkan Carl J Frederick mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Atau ada pula David Easton yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah baik negeri atau pihak swasta (Mukhsin, 2007).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, kebijakan lulus BTA dan PPI di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto sejalan atau merupakan bagian dari kebijakan publik, karena dalam proses pembuatan kebijakan misalnya para pihak pembuat kebijakan

memperhatikan masalah-masalah dalam pendidikan yang realitas terjadi dalam kehidupan sosial, kultural, agama dan sebagainya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bertolak dari bangunan pemikiran di atas, penulis merasa terdorong untuk menganalisis Kebijakan Publik (Study kasus kebijakan lulus Baca Tulis Al Qur'an (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto.

Metode

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis menggunakan beberapa metode penelitian penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiono, 2011).

Metode ini dipakai dalam rangka melihat dan memahami suatu obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Dengan metode kualitatif ini diharapkan akan terungkap gambaran mengenai realitas sasaran penelitian, yakni Kebijakan Publik (Study kasus kebijakan lulus Baca Tulis Al Qur'an (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto tanpa terpengaruh oleh pengukuran formalitas.

Untuk mengumpulkan data-data penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: Pertama, Observasi merupakan teknik pengumpulan data berupa pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti (Sutrisno Hadi, 2004).

Kedua, In-dept Interview merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Hasil

1. Latar Belakang Alasan Pembentukan Kebijakan lulus BTA dan PPI

Dalam undang-undang pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.

Lembaga Pendidikan dalam hal ini adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Purwokerto, sebuah sekolah swasta yang bercirikan Islam. Berkaitan dengan Out Put/mutu lulusan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Purwokerto diharapkan mampu memahami ajaran agama Islam secara benar, tetapi dalam perjalanannya mengalami berbagai masalah berkaitan dengan kompetensi lulusannya.

Problem-problem yang terjadi pada para lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Purwokerto menurut Kepala sekolah, Endah Susanti, S.Pd. Bio, M.Pd diantaranya:

"Pertama, beberapa alumni Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Purwokerto kurang bisa membaca al-Qur'an dengan fasih dan benar yang men-

gakibatkan masyarakat tidak percaya, untuk mendaftarkan anaknya. Kedua, banyaknya siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Purwokerto yang berlatar belakang pendidikan sekolah umum/dasar yang pengetahuan keagamaan lemah, Ketiga, keterbatasan sumber daya dan sarana-prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Purwokerto dalam pendidikan dan pengajaran BTA/PPI mengakibatkan: Tuntas BTA/PPI bagi para siswa tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

Dari berbagai masalah tersebut terlihat bahwa mutu siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Purwokerto sangat rendah yang berkaitan dengan pengetahuan BTA/PPI tentunya sangat memprihatinkan, padahal Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Purwokerto merupakan lembaga pendidikan yang menghasilkan para lulusan yang bisa menguasai ilmu agama Islam dan ilmu modern dengan baik tapi kenyataannya masih kurang. Hal tersebut tentunya menjadi tugas berat bagi para Bapak Ibu guru dengan karakter peserta didik yang menginjak dewasa tetapi mutu tentang nilai-dasar Islam masih sangat lemah.

Kemudian dikuatkan lagi dengan pendapatnya Ibu Apri Restiana Deri, S.Pd. Selaku waka kurikulum beliau menyampaikan bahwa rendahnya minta BTA/PPI siswa, yaitu;

"Menurut saya rendahnya keagamaan para siswa SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto dalam bidang BTA/PPI yaitu pada saat tes masuk masuk pendaftaran ketika di tes BTA/PPI rata-rata mereka yang dari lulusan sekolah dasar masih kurang, sementara siswa yang lulusan dari MI mereka sedikit-sedikit memahami tentang BTA/PPI, sehingga sekolah kami melalui waka kurikulum pernah membuat program pembiasaan tentang BTA/PPI yang diajar oleh para guru mapel umum, dan wali kelas yang dilakukan setiap siang setelah pembelajaran tetapi hasilnya kurang efektif.

Dari problem tersebut sebenarnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Purwokerto sudah berusaha secara maksimal, hal itu terlihat dari usaha disetiap hari setelah pembelajaran yang hasilnya kurang maksimal.

Kemudian Bapak Rijalul Fikri, S.Pd.I selaku Guru Agama, beliau mengatakan bahwa:

“saya selaku guru agama merasa terbebani karena masih banyaknya para siswa yang tidak bisa membaca al Qur’an, apa lagi pada saat mata pelajaran yang banyak terdapat tulisan Arabnya seperti Mapel Aqidah akhlaq, Al Qur’an, Bahasa Arab. sehingga menyulitkan saya untuk mengejar materi sesuai ketentuan atau ketuntasan dalam pembelajaran. Kemudian pada saat materi ibadah fiqih terutama tema wudhu dan sholat para siswa masih banyak yang wudhu tidak sesuai tarjih/ketentuan dan sholat pun masih banyak yang tidak hafal bacaanya yang mengakibatkan sholat tidak khusus.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa, dari problem di atas yang dikemukakan oleh kepala sekolah, waka kurikulum dan guru mata pelajaran perlu penanganan yang serius demi masa depan perkembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Purwokerto, dengan membuat kebijakan lulus BTA dan PPI bagi para siswanya, agar kepercayaan stakeholder kepada SMP tetap baik karena, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Purwokerto sebagai salah satu lembaga Pendidikan berbasis agama Islam yang menciptakan lulusan yang beriman, takwa dan profesional pembangun nusa bangsa.

2. Dasar Hukum

Menurut Din Wayudin dalam menetapkan sebuah kebijakan harus memiliki legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, sehingga perlu ada pemenuhan

atas prasyarat yang harus dipenuhi agar, kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat kostitusional sesuai hierarki yang berlaku disuatu wilayah, ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut, sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimate (Din Wayudin, 2014).

Dari SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto untuk mengatasi berbagai probelematika yang terjadi pada mutu para siswa berkaitan BTA dan PPI, di masa kepemimpinan Endah Susanti, S.Pd.Bio. M.Pd. membuat kebijakan, dengan dasar hukum yang sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu dengan membuat/menetapkan surat keputusan yang berisi tentang kebijakan agar lulus BTA/PPI disetiap jam efektif pembelajaran.

Kebijakan tersebut tertuang berdasarkan surat Keputusan kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Purwokerto nomor E2/092/I.03.02/SMPM3/Pwt/IV/2015 tentang penguatan Baca Tulis Al-Qur’an serta pengetahuan dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) pada peserta didik.

Ketentuan umum matrikulasi/pengayaan materi komptensinya dasar BTA dan PPI diwajibkan bagi para siswa yang belum lulus ujian komptensi dasar BTA dan PPI. Tekhnik pelaksanaan pembelajarannya adalah disetiap pagi dimulai dari jam 06.45 -08.00 WIB disetiap jam efektif pembelajaran. Materi kompetensi dasar BTA dan PPI Meliputi; Membaca Al-Qur’an secara tartil dan pengetahuan ilmu tajwid, Hafalan Al-Qur’an surat-surat pendek (juzama), Menulis kalimat arab (imla), Pengetahuan pengamalan ibadah (thaharah, shalat, puasa, zakat, dan haji).

Jadi dapat disimpulkan menurut penulis dengan berlandaskan surat Keputusan kepala SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto tentang pedoman penguatan materi Baca Tulis Al-Qur'an serta pengetahuan dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI), sehingga SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto pada masa kepemimpinan Endah Susanti, S.Pd.Bio. M.Pd. membuat kebijakan bagi para siswa yang belum lulus ujian baca, tulis Al-Qur'an (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) untuk wajib mengikuti penguatan materi BTA dan PPI yang dibimbing oleh para ustadz/ustadzah yang memiliki kompetensi dalam bidang agama Islam.

Standar Mutu Lulusan SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto, berdasarkan visi misi sekolah

1. Memiliki kepribadian sebagai muslim
2. Memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an (arab)
3. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu keIslaman dan umum secara mendalam
4. Memiliki kemampuan memahami isi buku teks berbahasa Arab dengan lancar
5. Mampu mempraktekan ibadah sesuai tarjih Muhammadiyah
6. Memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif.
7. Belajar secara mandiri dan berprestasi

Jadi dapat disimpulkan bahwa SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto dalam memberlakukan kebijakan lulus baca, tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah itu tidak asal-asalan tetapi sudah sesuai dengan visi dan misi dari SMP dalam menciptakan lulusan bermutu yang mampu menguasai ilmu agama, akhlak mulia dan keilmuan modern yang dilihat dari Out put mutu para lulusanya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Kesuksesan sebuah kebijakan sering diukur oleh seberapa baik proses implementasinya berjalan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan penghambat. Oleh karena itu, tidak berlebihan menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah bagian yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari proses formulasi kebijakan. Sebaliknya, keberhasilan suatu kebijakan seringkali sangat tergantung pada kohesi antara formulasi dan implementasi, serta kesesuaian dengan tatanan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk lebih spesifik akan dibahas tentang faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penetapan kebijakan lulus Baca Tulis Al Qur'an (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto.

a. Faktor pendukung

Dalam konteks penelitian tentang implementasi kebijakan, faktor pendukung adalah elemen atau kondisi yang membantu atau mempermudah proses kebijakan serta berkontribusi terhadap keberhasilan dan validitas hasil penerapan kebijakan. Faktor pendukung kegiatan baca tulis Al-Qur'an dan praktek pengamalan ibadah di sekolah meliputi berbagai aspek yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program tersebut. Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang penting.

Menurut Endah Susanti, S.Pd.Bio, M.Pd selaku kepala sekolah mengatakan bahwa faktor pendukung dari pelaksanaan kebijakan lulus Baca Tulis Al Qur'an (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto.

“Disekolahkan kami faktor pendukung dari kebijakan lulus BTA dan PPI diantaranya: Pertama, kebijakan tersebut didukung penuh oleh wali murid, Kedua. Guru yang Berkualifikasi yaitu Guru yang memiliki keahlian dalam mengajar Al-Qur'an dan praktek ibadah. Mereka rata-rata para ustadz/ustadzah dari pondok pesantren yang bekerjasama dengan SMP muammadiyah 3 Purwokerto. Ketiga, Suasana yang Religius/Lingkungan sekolah yang kondusif untuk kegiatan keagamaan, termasuk adanya ruang ibadah. Kempat, Kurikulum Integratif dengan kegiatan baca tulis Al-Qur'an dan ibadah dalam kurikulum formal sekolah”.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan adalah berbagai elemen atau kondisi yang menghalangi atau memperlambat pelaksanaan suatu kebijakan sehingga tujuan atau hasil yang diharapkan tidak tercapai secara optimal. Faktor-faktor ini dapat bersifat internal maupun eksternal dan mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Menurut Endah Susanti,S.Pd.Bio, M.Pd selaku kepala sekolah mengatakan bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan lulus Baca Tulis Al Qur'an (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto.

“menurut saya selaku kepala sekolah ada beberpa penghambat dalam pelaksanaan kebijakan lulus BTA dan PPI di sekolah kami yaitu: Pertama, masih banyaknya anak yang buta huruf hijaiyah, terutama mereka yang awal dasarnya adalah sekolah dari umum/sedikit penjaran tentang keagamaan, jika mereka lulusan dari sekolah madrasah mereka cepat bisa mngikuti karena sudah memiliki dasar baca tulis Al Qur'an dan praktek pengamalan ibadah Kedua. Anggaran yang tidak mencukupi untuk mendanai program kebijakan agar lebih berkualitas. Ketiga, kurangnya waktu dalam pembelajaran kususnya tentang BTA dan PPI karena pembelajaran hanya

60 menit perhari. Keempat. Kekurangan infrastruktur atau alat yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.

Pembahasan

Pendidikan merupakan barang dan jasa yang dimiliki oleh masyarakat umum (publik) dalam hal ini SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto, yang mana di dalamnya masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, utamanya dalam memberikan kesempatan untuk belajar. Oleh karena itu pendidikan merupakan public goods, maka sudah seharusnya penelitian mengenai kebijakan pendidikan masuk pada ranah kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan suatu proses yang amat kompleks, bersifat analitis dan politis yang tidak mempunyai awal atau akhir dan batas-batas dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti. Kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan kompleks yang disebut pembuatan kebijakan itu menghasilkan suatu akibat yang dinamakan kebijakan.

Secara terminologi kebijakan publik menurut Robert Eyestone ialah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Kebijakan publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para menajer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat (Syafaruddin, 2008).

Maka dapat dikatakan bahwasannya kebijakan publik dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan, dari sini dapat kita lihat bahwa lembaga-lembaga pemerintahan atau aktor yang legitimasi dalam mengeluarkan serangkaian intruksi kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan cara-cara untuk tercapainya tujuan.

Sebuah kebijakan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya melainkan adanya perencanaan dari sebuah fenomena dan masalah yang muncul secara publik yang menjadi petunjuk arah bagi pelaksana kebijakan agar tujuan dari solusi permasalahan dapat terlaksana dengan baik sehingga tercapainya tujuan yang sesuai diinginkan (Suwarno, 2016).

Menurut Carl J Friderick, kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut, dalam rangka mencapai tujuan tertentu (M.Irfan, 2001).

Dalam hal ini kasus yang terjadi di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto banyaknya in-put yang masuk adalah para siswa sekolah dasar umum yang sedikit pengajaran agama Islam, sementara SMP Muhammadiyah adalah sekolah swasta yang bercirikan Islam dan sudah barang tentu mata pelajarannya lebih dominan tentang mata pelajaran agama Islam, seperti; bahasa Arab, akidah, akhlaq, ibadah praktis, sejarah kebudayaan Islam, kemuhammadiyah, al Qur'an dan Hadist.

Untuk bisa menguasai mata pelajaran tersebut tentunya membutuhkan dasar baca tulis Al Quran yang baik, namun kenyataannya para siswa masih sedikit yang paham, hal

tersebutlah yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Jadi sekolah membuat kebijakan lulus BTA dan PPI tidak serta merta asal membuat atau memutuskan, akan tetapi didasari oleh hambatan yang terjadi pada diri siswa.

Dari sini dapat dipahami bahwa kebijakan itu adalah sebuah usulan yang mengesankan terciptanya sebuah tindakan yang menginginkan tercapainya suatu tujuan.

Ketika dikaitkan dengan UU Sisdinas menyatakan bahwa, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirnya UU Sisdikna tentang konsep tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan sisdiknas terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", Melalui pendidikan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidup yang ingin dia capai dengan cara bekerja.

Sejalan dengan UU Sisdinas, SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto adalah Sekolah agama Islam, sering disebut sebagai madrasah atau pesantren, memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sekolah-sekolah umum. Berikut adalah beberapa karakteristik utama sekolah agama Islam adalah Pertama, Nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran dan kegiatan sekolah.

Kedua, Fokus pada pembentukan akhlak mulia dan karakter yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, Program hafalan Al-Qur'an (tahfidz) yang biasanya menjadi bagian penting dari kurikulum. Keempat, Pendekatan yang seimbang antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama untuk

membentuk siswa yang cerdas secara intelektual dan spiritual.

Kelima, Guru tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Keenam, Kolaborasi dengan wali murid, masjid atau organisasi Islam setempat untuk mendukung kegiatan keagamaan dan sosial.

Jadi dapat disimpulkan bahwa SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto secara keseluruhan selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UUSisdiknas, memastikan bahwa memberikan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional. Ini memungkinkan lulusan madrasah/pesantren memiliki kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional, baik dalam bidang agama maupun umum. Sehingga perlu membuat inovasi atau kebijakan pendidikan agar masyarakat semakin percaya bahwa sekolah berbasis agama adalah sekolah yang berkualitas, karena dimasyarakat masih banyak anggapan bahwa sekolah berbasis agama hanya bisa mencetak para lulusan yang bisa agama tetapi tidak bisa berkembang di masyarakat dan dunia modern.

Kebijakan pendidikan secara kuantitatif dapat meningkatkan derajat rasionalitas dalam proses pembuatan keputusan di sektor publik. Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia.

Menurut Duncan MacRae analisis kebijakan adalah “sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik (Suryadi, Aceh dan H.A.R. Tilaar, 1994). Dalam hal ini analisis kebijakan merupakan suatu cara atau

prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap sesuatu hal dan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan.

Kebijakan yang di hasilkan oleh sebuah pemerintahan tentunya melalui proses ilmiah untuk menghasilkan sebuah kebijakan, begitu juga dengan kebijakan pendidikan yang meracik seputar kebutuhan dalam pendidikan agar dapat terlaksana, untuk merumuskan kebijakan pendidikan berdasarkan sistematis agar masalah yang terjadi segera terselesaikan.

Masalah kebijakan (publik) adalah kebutuhan dan nilai yang belum terpenuhi atau kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang hanya dapat dilakukan melalui kebijakan publik. Isu kebijakan (publik) adalah pandangan yang berbeda tentang masalah kebijakan serta cara untuk memecahkannya (W.N. Dunn, 2003).

Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan sehingga dapat memunculkan kegelisahan pada masyarakat. Bermuara dari problem yang muncul hingga berkembang menjadi hot news issue yang berkembang di kancah publik menuai pro-kontra yang merupakan hasil perdebatan mengenai definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah.

Oleh karena itu munculnya suatu masalah misalnya study kasus yang terjadi di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto berkaitan rendahnya penguasaan Baca Tulis Al Quran (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) oleh para siswanya, sehingga pihak sekolah memutuskan membuat kebijakan untuk semua para siswanya setelah lulus dari SMP muhmmadiyah 3 Purwokerto harus lulus/ bisa BTA dan PPI.

Mengingat SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto adalah sekolah yang berkarakter Islam yang kuat, sehingga jika terjadi para lulusannya tidak memiliki kemampuan dasar BTA dan PPI, sekolah tersebut bisa dikatakan gagal dalam memegang amanah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto berusaha untuk menanamkan dasar karakter Islam pada diri siswanya.

Ketika anak atau para siswa tidak memiliki dasar agama Islam, ada beberapa konsekuensi yang bisa muncul, baik dari segi spiritual, moral, maupun sosial. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin terjadi: pertama, Anak mungkin merasa kehilangan arah atau tujuan hidup karena tidak memiliki pegangan spiritual yang kuat, Kedua. siswa tanpa dasar agama lebih mudah terpengaruh oleh budaya negatif, seperti pergaulan bebas, narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya, dan menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Ketiga. siswa kurang memiliki sikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam keyakinan maupun budaya. Keempat. siswa kesulitan membina keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Selanjutnya isu menjadi embrio bagi awal munculnya masalah publik di bidang pendidikan, jika masalah ini mendapat perhatian khalayak ramai maka akan menyebabkan isu tersebut masuk ke dalam agenda kebijakan khususnya agenda kebijakan pendidikan (Ali Imron, 2006).

Isu yang muncul dan berbuntut masalah di dunia pendidikan pada umumnya berupa siswa, guru, sekolah, kepala sekolah, lembaga pendidikan, mulai dari tingkat

kabupaten atau kotamadya hingga tingkat elit yaitu di kementerian pendidikan, semua ini merupakan sorotan publik terhadap perkembangan pendidikan baik di tinjau secara umum maupun secara khusus.

Sebagai contoh isu yang sedang berkembang mengenai kualitas pendidikan yang sangat kurang berkualitas seperti Problem moral yang terjadi pada siswa diantaranya ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, penyelenggaraan kegiatan seksual secara bebas, dan etos kerja / semangat belajar yang rendah. Jika tidak segera ditangani bagaimana masadepan generasi bangsa. Sehingga setiap lembaga pendidikan perlu trobosan-trobosan dalam membentuk karakter yng sesuai maratabat bangsa

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan, para pembuat kebijakan hendaknya memperhatikan beberapa karakteristik khusus (Malcoln L. Goggin dkk, 1990). Adapun karakteristik yang dimaksud adalah: Pertama. Memiliki tujuan pendidikan, kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

Kedua, Memenuhi aspek legal-formal, kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

Ketiga, Memiliki konsep operasional, kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

Keempat, Dibuat oleh yang berwenang, kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

Kelima, Dapat dievaluasi, kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

Keenam, Memiliki sistematika, kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan substansibilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya.

Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian kebijakan pendidikan harus padu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

Kemudian ada beberapa prinsip mengenai kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, prinsip tersebut, diantaranya:

Pertama, Nilai-nilai pendidikan harus mewarnai setiap kebijakan negara dalam berbagai bidang sehingga aspek-aspek kemanusiaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, pemerintahan pembangunan, keadilan hukum mencerminkan keadilan suatu bangsa yang bermoral dan bermartabat. Jadi, nilai-nilai pendidikan harus berperan secara proaktif untuk memasuki semua bidang yang berkembang dalam masyarakat sejalan dengan era globalisasi yang semakin cepat serta memberikan pengaruh yang besar.

Kedua, Pendidikan harus terbebas dari intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan. Namun pada kenyataannya pendidikan tidak dapat dipisahkan sebagai alat untuk merayu masyarakat secara umum untuk perebutan kekuasaan. Hal tersebut mengakibatkan penentuan pembuat kebijakan pendidikan dalam hal ini pemerintah pusat akan dipengaruhi oleh nuansa politik dan sarat dengan kepentingan tertentu.

Ketiga, Nilai-nilai pendidikan harus menjiwai sistem perpolitikan dan prinsip penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan. Pendidikan berperan memberikan masukan berupa penguasaan kompetensi serta aspek keprofesionalitas dan

tidak kalah pentingnya juga harus mengubah moral dalam dunia perpolitikan.

Keempat, Nilai-nilai pendidikan harus menjadi spirit yang menjiwai kepribadian dan budaya bangsa yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan mempunyai peran penting yang bertugas untuk menyatukan dan memberikan keseimbangan bahwa masing-masing individu meskipun memiliki sifat dan perilaku yang berbeda yang dilatar belakangi kebudayaan mereka, tidak menyurutkan untuk senantiasa saling menghormati dan menghargai.

Kelima, Pendidikan harus menjadi garda terdepan dari suatu proses perubahan dan menjadi lokomotif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pendidikan merupakan pusat atau inti dari perkembangan serta pengembangan peradaban berbagai macam bangsa dengan cara mengubah pola pikir.(Ratana Dewi, 2016).

Simpulan

Analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik

Sebuah kebijakan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya melainkan adanya perencanaan dari sebuah fenomena dan masalah yang muncul secara publik yang menjadi petunjuk arah bagi pelaksana kebijakan agar tujuan dari solusi permasalahan dapat terlaksana dengan baik sehingga tercapainya tujuan yang sesuai diinginkan

Berkaitan kebijakan lulus Baca Tulis Al Qur'an (BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) bagi para siswa SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto, yang disebabkan oleh kurangnya memahami BTA dan PPI dalah solusi yang tepat, karena lulusan sekolah yang berbasis islam seharusnya mampu menghasilkan para lulusan yang pandai dan berkarakter Islam. Agar kelak hidup di masyarakat mampu memberikan sumbangsih terbaik untuk memajukan agama, masyarakat, nusa dan bangsa.

Dalam memutuskan kebijakan pun sekolah tidak serta keputusan sekolah secara sepihak tetapi sudah melakukan perencanaan dan komunikasi dengan Stekholder seperti: wali murid, tokoh agama dan pemangku pendidikan yang lain.

Referensi

- Khairina, muhammad syaifudin.2023. Konsep dasar analisis kebijakan. *Jurnal bening prodi manajemen univeritas riu kepulauan batam*. Volume 10 no. 2. <https://doi.org/10.33373/bening.v10i2.5963>
- M.Irfan. (2001). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muchsin. (2007). *Politik Hukum Dalam Pendidikan Nasional*. Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri
- Ratna Dewi. 2016. Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/617>
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strateg Dan Aplikasi Kebijakan Menurut Organisasi sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta

- Sa'id Aqiel Siradj, dkk. (1999). *Pesantren Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Suryadi, Aceh dan H.A.R. Tilaar. (1994) *Analisis Kebijakan Pendidikan, Sebuah Pengantar*. Bandung: Rosdakarya,
- Syafaruddin. (2008). *Evektivitas Kebijakan Pendidikan: konsep, strategi, dan aplikasi kebijakan menuju organisasi sekolah efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwarno. (2016). Pendekatan Kebijakan Publik dalam Politik Pendidikan Islam. *Jurnal As-Salam*, Vol.1, No. 1, 7 (1) 62-72. <https://jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/45>
- Teguh, W. (2018, Januari 14). *Menyambut Perbub Penguatan Pendidikan Karakter*. Purwokerto: Koran Kolom Opini SatelitPost.
- Teguh, W. (2018, Agustus 9). *Kemenangan Sekolah Berbasis Agama* .Purwokerto: koran Kolom Opini SatelitPost.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Dan 2

This page is intentionally left blank